Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Urgensi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak

Urgency of the Regional Child Protection Commission (KPAD) of Asahan Regency in Providing Legal Protection for Children

Ari Dermawan*, Riswan Munthe, Rahmat Hidayah*****

Prodi Manajemen Informatika, STIMK Royal Kisaran, Indonesia

Fakultas Hukum, Universitas Medan Are, Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Indonesia

*Corresponding Email: aridermawan451@gmail.com, riswan@staff.uma.ac.id, rahmathidayah2585@gmail.com

Diterima: Maret 2021; Disetujui: Oktober 2021; Dipublish: Oktober 2021

Abstrak

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan merupakan lembaga yang menjadi pihak dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai macam kejahatan, baik anak menjadi korban maupun anak sebagai pelaku. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas dasar hukum pelaksanaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan, dan Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisa data primer dan data sekunder dengan meneliti langsung ke lapangan serta baik dari bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa dasar pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan menjalankan tugas wajib sesuai regulasi perundang-undangan yang telah ada. Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban maupun pelaku secara pelayanan komprehensif (multi aspek), holistik (secara menyeluruh, terpadu) dan layanan terpadu yang terkoordinasi.

Kata Kunci: Urgensi, Perlindungan Hukum, Anak

Abstract

The Regional Child Protection Commission (KPAD) of Asahan Regency is an institution that is the party in providing protection for children from various kinds of crimes, both children become victims and children are perpetrators. The purpose of this research is to discuss the legal basis for implementing the Regional Child Protection Commission (KPAD) of Asahan Regency, and the implementation of legal protection for children by the Regional Child Protection Commission (KPAD) of Asahan Regency. The research method used is empirical legal research by analyzing primary data and secondary data by examining directly into the field and both from literature. Based on the results of this study, that the basis of legal regulation regarding child protection is Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The Regional Child Protection Commission (KPAD) of Asahan Regency carries out mandatory duties in accordance with existing statutory regulations. The Regional Child Protection Commission (KPAD) of Asahan Regency provides protection for children as victims and actors in a comprehensive (multi-aspect), holistic (comprehensive, integrated) and coordinated integrated service.

Keywords: Urgency, Legal Protection, Children

How to Cite: Dermawan. A, Munthe. R, Rahmat Hidayah. (2021). Urgensi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak. *Doktrina: Journal of Law*. 4 (2): 127-136

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945) Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Anak sebagai pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. (Nasir Djamil, 2013).

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu,

perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. (Maidin Gultom, 2013)

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan merupakan lembaga yang menjadi pihak dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai macam kejahatan, baik anak menjadi korban maupun anak sebagai pelaku. dasar pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan sendiri selalu berkoordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

Adapun tugas dan fungsi utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak mempunyai fungsi: mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum, teknis, operasional bidang

mobilisasi penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mengkoordinasikan penyiapan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kajian, ketentuan dan standart program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan pergerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sesuai ketentuandan standar yang ditetapkan. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengaturan dan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pemberdayaan program Keluarga Berencana. Mengkoordinasikan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta kesehatan reproduksi remaja. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum. Pengelolaan Unit Pelaksanan Teknis. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu kewaktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri,

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (UNHCR, 2002) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dalam hal ini berperan andil cukup banyak dalam memberikan pembangunan karakter terhadap perempuan dan anak. Secara otomatis bersinkronisasi dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan.

Konsekuensi dari lingkup perlindungan hukum bagi anak sebagaimana yang dimaksud di atas adalah, bahwa semua kebijakan legislatif (produk perundang-undangan) yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak, dan terwujudnya kesejahteraan anak. (Waluyadi, 2009). Sehingga agar terwujud kesejahteraan anak secara optimal Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan sangat diharapkan dalam menjadmin perlindungan terhadap anak di Kabupaten Asahan.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan

kewajiban, dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak secara penuh, akan tetapi pada kenyataannya undang-undang tersebut belum bisa mengoptimalkan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan anak hakikatnya berasaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi : (1) Non diskriminasi; (2) kepentingan yang terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak. (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan bisa kita artikan secara utuh sebagai pelayan dan pelindung anak korban kekerasan, sehingga akan mampu memberikan pelayanan yang bisa berkordinasi dengan berbagai pihak atau segala sector terkait, baik itu melalui penanganan medis, psikologi dan hukum berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi, baik dari lingkungan pemerintah maupun masyarakat yang dibangun bersama secara terbuka dan terjangkau oleh masyarakat.

Salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan orang di Indonesia adalah daerah Propinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan Propinsi Sumatera Utara dalam praktek perdagangan perempuan memiliki tiga fungsi strategis, yaitu sebagai daerah asal (*sending area*), daerah penampungan sementara (*transit*) dan juga sebagai daerah tujuan perdagangan manusia. Disisi lain berkaitan dengan posisi geografis daerah Sumatera Utara yang strategis dan mempunyai aksesibilitas tinggi ke jalur perhubungan dalam dan luar negeri serta kondisi perkembangan daerah Sumatera Utara yang cukup baik di berbagai bidang. Sumatera Utara yang teridentifikasi daerahnya rawan perdagangan manusia sebanyak 8 (delapan) Kabupaten/Kota, antara lain : Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Tanjung Balai dan Simalungun. (Emy Suryana, 2009).

KPAI sebagai suatu lembaga yang bersifat independen, artinya dalam menjalankan tugas-tugasnya KPAI tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan darimanapun serta kepentingan apapun, kecuali satu, yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak. (Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) tahun 1989).

Berbicara mengenai tugas, wewenang, dan fungsi, hakikatnya KPAI bertugas dalam hal : (Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002) (a) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; (b) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tentunya terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji dan dianalisis guna memecahkan masalah hukum yang berkenaan dengan Urgensi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak. Sehingga dalam tulisan ini hanya membatasi dasar hukum pelaksanaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan, dan Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tentunya terdapat beberapa masalah yang

perlu dikaji dan dianalisis guna memecahkan masalah hukum yang berkenaan dengan Urgensi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak. Sehingga dalam tulisan ini hanya membatasi dasar hukum pelaksanaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan, dan Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kabupaten Asahan, yaitu di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, dilakukan disini sebab KPAD Kabupaten Asahan langsung anggarannya dibawah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan tempat objek yang diteliti

pada KPAD Kabupaten Asahan. Teknik pengumpul data terbagi menjadi dua yakni untuk data primer dengan langsung mengambil data kepada Dinas P2KBP3A Kabupaten Asahan. Metode pengumpulan data melalui wawancara langsung yang dilakukan secara mendalam kepada sumber data. Adapun untuk data primer dan sekunder dari telaah berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui, studi kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, internet dan data-data yang diperoleh relevan kaitannya dengan penelitian.

Analisis data terhadap yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Setelah pengumpulan data dilakukan, baik dengan studi kepustakaan maupun studi lapangan dan wawancara, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap

data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yaitu berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan cara metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pelaksanaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. (Rena Yulia, 2010). Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.

Adapun dasar hukum pelaksanaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara umum dikatakan, “anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi” Dilihat dari segi sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh sebab itulah kewajiban dan tanggung jawab dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan secara penuh terhadap anak agar hak-hak dasar anak tersebut tidak dilanggar.

Tentunya dengan alasan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus

cita-cita bangsa, oleh sebab itulah maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tujuan agar hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi tersebut dapat terpenuhi secara optimal demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002).

Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Wagiati Soetodjo, 2010).

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan wajar baik fisik, mental, dan sosial. (Maidin Gultom, 2013).

Pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dibentuklah suatu lembaga yang bersifat Independen yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang selanjutnya disingkat dengan KPAI. KPAI sendiri lahir sebagai implementasi dari adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak selain itu juga adanya Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 yang menjadi dasar hukum pembentukan lembaga KPAI ini.

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan dapat memberikan perlindungan Korban dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (jika korban anak) antara lain sebagai berikut : 1) Hak kerahasiaan identitas korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan keluarganya sampai derajat kedua (Pasal 44); 2) Hak untuk mendapatkan

perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/ atau hartanya (Pasal 47); 3) Hak mendapatkan restitusi (Pasal 48); 4) Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51); 5) Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara (Pasal 54).

Adapun perlindungan yang dilakukan oleh KPAD Kabupaten Asahan dan bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan terhadap anak korban yaitu penanganan medis, psikologi dan hukum berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi, baik dari lingkungan pemerintah maupun masyarakat yang dibangun bersama secara terbuka dan terjangkau oleh masyarakat. Penanganan yang diberikan dan dibangun sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Komprehensif (multi aspek);
- 2) Holistik (secara menyeluruh, terpadu);
- 3) Sesegera mungkin (dilakukan secara koordinasi multi sektoral);
- 4) Layanan terpadu yang terkoordinasi (mudah diakses & selalu siap dan terjaga kerahasiaannya).

Strategi yang dilakukan KPAD Kabupaten Asahan dan bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.

P2TP2A Kabupaten Asahan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, yaitu: 1) Kerjasama dengan instansi terkait, sesuai SPM: Dinas Kesehatan (medis), Kepolisian (layanan hukum), Dinas Sosial (rumah aman, pemberdayaan); 2) Kerjasama dengan organisasi masyarakat yang punya jaringan luas hingga akar rumput; 3) Kerjasama dengan tokoh agama, tokoh adat/masyarakat; 4) Membuat komitmen yang diperkuat dengan MoU, SK dan Perda; 5) Koordinasi rutin dalam bentuk rapat evaluasi, dialog dan diskusi.

KPAI sebagai suatu lembaga yang bersifat independen artinya dalam menjalankan tugas-tugasnya KPAI tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan darimanapun serta kepentingan apapun, kecuali satu, yaitu Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat ditarik simpulan bahwa

pada KPAD Kabupaten Asahan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan selalu bekerjasama dalam melaksanakan perlindungan anak di Kabupaten Asahan. Adapun dasar hukum pelaksanaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Asahan memberikan perlindungan dan pelayanan secara pelayanan komprehensif (multi aspek), holistik (secara menyeluruh, terpadu), Sesegera mungkin (dilakukan secara koordinasi multi sektoral), layanan terpadu yang terkoordinasi (mudah diakses dan selalu siap dan terjaga kerahasiaannya).

DAFTAR PUSTAKA

- Chaeruddin dan Syarif Fadillah, (2004), *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Grahaadika Press.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban*

- Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Farhana, (2012), *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, (2013), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil, (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Wagiati Soetodjo, (2010), *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama.
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban